

Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Sary Zuanda¹, Dewi Wulandari Fahrezi², Gilang Fabiola Rised³,
Muhammad Syaifuddin⁴

^{1,2,3,4} Pascasarjana Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail : saryzuanda1999@gmail.com¹, wulanfahrezi@gmail.com²,
gilangfebiolarised.gf@gmail.com³, muhammadsyaifudin74@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan, dan mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan efektif di lapangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan fokus pada tinjauan pustaka. Proses pemilihan artikel dilakukan dengan teliti untuk memastikan literatur yang digunakan memenuhi kriteria tersebut. Data dikumpulkan dari database Jurnal Sinta dan Garuda Ristek Dikti. Pencarian artikel difokuskan pada topik implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan, menggunakan query pencarian melalui Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan menekankan pentingnya perencanaan matang, sosialisasi efektif, pelaksanaan tepat, dan evaluasi cermat. Aspek utama yang ditekankan meliputi Kurikulum Merdeka, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan pembaruan sarana prasarana. Kerjasama erat antara semua pihak diperlukan dalam proses implementasi, sementara evaluasi komprehensif membantu mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan dampak kebijakan. Inisiatif seperti metode pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran menunjukkan peningkatan kualitas dan prestasi siswa, tetapi juga mengungkapkan tantangan seperti kurangnya sumber daya dan kesenjangan antar sekolah. Kesimpulannya, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan adalah proses dinamis dan kompleks yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dengan temuan evaluasi membantu memperbaiki dan melanjutkan inisiatif yang berhasil.

Kata kunci: *Kebijakan, Evaluasi, Pendidikan*

Abstract

This research aims to analyze the implementation and evaluation of education policies, and determine the extent to which the policies that have been established can be implemented effectively in the field and identify factors that hinder or support the implementation of these policies. The research method used in this study is a qualitative method with a focus on literature review. The article selection process was carried out carefully to ensure that the literature used met these criteria. Data was collected from the Sinta Journal and Garuda Ristek Dikti databases. The article search focused on the topic of implementation and evaluation of educational policies, using search queries via Google Scholar. The research results show that the implementation and evaluation of education policies emphasizes the importance of careful planning, effective socialization, precise implementation, and careful evaluation. The main aspects emphasized include the Independent Curriculum, improving the quality of teaching staff, and updating infrastructure. Close collaboration between all parties is required in the implementation process, while comprehensive evaluation helps identify policy successes, challenges and impacts. Initiatives such as project-based learning methods and the use of technology in learning show improvements in student quality and achievement, but also reveal challenges such as lack of resources and disparities between

schools. In conclusion, the implementation and evaluation of education policy is a dynamic and complex process that is important for improving the quality of education, with evaluation findings helping to refine and continue successful initiatives.

Keywords : *Policy, Evaluation, Education*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran vital dalam pembangunan suatu bangsa, sehingga kebijakan pendidikan yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, implementasi kebijakan pendidikan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya, resistensi dari pemangku kepentingan, dan ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi lokal. Menurut Fullan (2015), perencanaan kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan dinamika perubahan di lapangan dan melibatkan pemangku kepentingan sejak awal untuk memastikan keberhasilannya.

Kebijakan pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan dan pembaruan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tantangan global. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Misalnya, Kurikulum Merdeka yang diterapkan dan dirancang untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam berbagai bidang, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Subhkan & Wahyudin, 2024). Kurikulum ini menekankan pendekatan yang lebih fleksibel dan holistik, yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi guru-guru untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi mereka, yang diharapkan dapat mendukung implementasi kurikulum baru secara efektif (Hastasasi, 2022).

Namun, implementasi kebijakan pendidikan sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya material. Banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak. Selain itu, masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengimplementasikan kurikulum baru. Faktor-faktor ini dapat menghambat proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Mukhlisin et al., 2024).

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan pendidikan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan efektif dan efisien. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, evaluasi kebijakan pendidikan dapat menjadi acuan penting bagi pengambil keputusan dalam merumuskan strategi pendidikan yang lebih baik (Rossi et al., 2018). Misalnya, evaluasi terhadap implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa meskipun kurikulum ini memiliki banyak keunggulan, seperti pendekatan tematik dan integratif, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan sumber daya dan pelatihan bagi guru (Rasmanah et al., 2024).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan. Artikel ini ingin mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan efektif di lapangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan fokus pada tinjauan pustaka. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami aspek-aspek utama yang terkait dengan implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan (Semiawan, 2010). Kriteria pemilihan literatur dalam kajian ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, artikel jurnal yang dipilih harus sangat relevan

dengan topik penelitian, yaitu implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan. Kedua, untuk memastikan kualitas akademik yang tinggi, literatur yang digunakan harus dipublikasikan dalam jurnal dan buku terpercaya. Ketiga, artikel yang dipilih harus memiliki konten yang sangat relevan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan. Keempat, literatur yang dipilih harus dipublikasikan dalam periode waktu yang relevan dengan perkembangan terbaru di bidang ini, sehingga memastikan keakuratan dan relevansi informasi yang disajikan.

Proses pemilihan artikel dilakukan dengan teliti untuk memastikan literatur yang digunakan memenuhi kriteria tersebut. Data dikumpulkan dari database Jurnal Sinta dan Garuda Ristek Dikti. Pencarian artikel difokuskan pada topik implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan, menggunakan query pencarian melalui Google Scholar. Data tambahan juga diperoleh dari buku dan sumber referensi lain yang relevan. Oleh karena itu, metode ini dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik ini (Dragoi, 2021). Setelah semua makalah terkumpul, analisis dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif seperti reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan validasi data (Nugrahani, 2014).. Reduksi data melibatkan pengumpulan dan pengkategorian informasi yang relevan dari setiap artikel, sementara penyajian data melibatkan pengorganisasian informasi untuk pemahaman yang lebih mendalam. Kesimpulan kemudian diambil untuk mengidentifikasi temuan penting dan memvalidasi data yang ditemukan dalam penelitian ini. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pemilihan literatur dan analisis data dilakukan dengan cermat dan sistematis, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap validitas penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan peningkatan sarana prasarana. Salah satu kebijakan utama yang diimplementasikan adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan sebuah inovasi dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dalam mengatur kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal., Kurikulum Merdeka dirancang untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam berbagai aspek, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta memperkuat integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum (Subhkan & Wahyudin, 2024).

Kurikulum Merdeka tidak hanya mengacu pada aspek akademis, tetapi juga memperhatikan pengembangan karakter dan kepribadian siswa. Selain itu, kurikulum ini mempromosikan pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi nyata, sehingga siswa dapat memahami relevansi dan aplikasi dari apa yang dipelajari. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka mendorong siswa untuk lebih aktif dan berpikir kritis, serta mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran (Subhkan & Wahyudin, 2024).

Selain pengembangan kurikulum, implementasi kebijakan pendidikan juga mencakup peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi guru-guru guna meningkatkan profesionalisme dan kompetensi mereka. Program pelatihan ini meliputi berbagai aspek pembelajaran yang mencakup metode pengajaran yang inovatif, pembelajaran berbasis teknologi, dan penilaian yang komprehensif. Melalui pelatihan ini, diharapkan guru-guru dapat lebih siap dan mampu mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara efektif di kelas (Yunalis & Herman, 2018).

Kebijakan lain yang turut diimplementasikan adalah peningkatan sarana dan prasarana. Fasilitas pendidikan yang memadai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Pemerintah telah melakukan pembangunan dan renovasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Dengan adanya fasilitas yang memadai, diharapkan

pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa (Marliani, 2023).

Implementasi kebijakan pendidikan adalah proses yang kompleks dan memerlukan perhatian pada berbagai aspek untuk memastikan keberhasilannya. Perencanaan yang matang adalah langkah awal yang sangat penting. Perencanaan ini harus melibatkan analisis kebutuhan, penetapan tujuan yang jelas, dan pengembangan strategi yang relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Menurut Fullan (2015), perencanaan yang efektif harus mempertimbangkan dinamika perubahan di lapangan pendidikan dan melibatkan pemangku kepentingan dari awal untuk memastikan keberhasilan implementasi.

Sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk finansial, tenaga pengajar, maupun material pendidikan, juga sangat penting. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan dapat diimplementasikan dengan efektif. Studi oleh Hanushek dan Woessmann (2015) menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan berkualitas tinggi sangat berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, sehingga alokasi anggaran yang tepat menjadi krusial dalam mendukung kebijakan pendidikan.

Partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, sangat penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Keterlibatan mereka tidak hanya meningkatkan dukungan tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Menurut penelitian oleh Penuel (2016), kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan melalui peningkatan kepemilikan dan komitmen bersama. Evaluasi berkelanjutan adalah kunci untuk mengukur efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Evaluasi yang sistematis memungkinkan pihak berwenang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan serta mengambil tindakan korektif. Darling-Hammond (2017) mengemukakan bahwa evaluasi berkelanjutan berdasarkan data empiris penting untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dan adaptasi kebijakan pendidikan.

Penyesuaian kebijakan berdasarkan umpan balik dari pelaksana di lapangan, seperti guru dan siswa, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Kebijakan harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Penelitian oleh Spillane et al. (2002) menekankan bahwa kebijakan yang responsif dan adaptif lebih mampu menghadapi tantangan implementasi dan mencapai hasil yang diinginkan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Kebijakan yang direncanakan dengan baik, didukung oleh sumber daya memadai, melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, dievaluasi secara berkelanjutan, dan disesuaikan berdasarkan umpan balik akan lebih mungkin berhasil.

Tahapan Implementasi Kebijakan Pendidikan Dilapangan

Proses implementasi kebijakan pendidikan di lapangan melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak terkait. Tahapan ini dimulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Tahap perencanaan merupakan fondasi utama dalam implementasi kebijakan. Di tahap ini, para pemangku kepentingan, termasuk dinas pendidikan, sekolah, komite sekolah, dan masyarakat setempat, berkolaborasi untuk merumuskan rencana pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks. Perencanaan yang matang mempertimbangkan tantangan yang mungkin dihadapi serta potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan (Husnun, 2023). Sosialisasi merupakan langkah penting untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh dan dukungan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Melalui berbagai cara, seperti pertemuan, seminar, pelatihan, dan distribusi materi informatif, semua pihak terkait diberi pemahaman yang baik tentang tujuan, manfaat, dan tata cara pelaksanaan kebijakan. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan tingkat partisipasi dan keterlibatan aktif dari seluruh stakeholder (Aulia, 2016).

Pelaksanaan kebijakan dilakukan di tingkat sekolah, di mana guru-guru dan staf sekolah menjadi pelaku utama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Guru-guru memainkan peran penting dalam mengimplementasikan kurikulum, mengajar dengan metode yang sesuai, dan mengukur kemajuan siswa sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Kepala sekolah dan staf administratif juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran dan kegiatan sekolah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Taufan & Mazhud, 2016).

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan secara kontinu untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kendala yang muncul selama proses implementasi. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan korektif secara cepat agar proses implementasi tidak terganggu. Sementara itu, evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup analisis mendalam terhadap data kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan dampak kebijakan terhadap pembelajaran siswa, kinerja sekolah, dan kemajuan keseluruhan sistem pendidikan.

Pendekatan dan Model Implementasi Kebijakan Pendidikan

Pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan kebijakan tersebut. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan top-down, di mana kebijakan dirumuskan oleh pemerintah pusat dan diterapkan secara seragam di seluruh wilayah. Pendekatan ini memiliki keuntungan dalam hal konsistensi dan standarisasi, namun sering kali menghadapi tantangan dalam penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Menurut Hallinger dan Heck (2011), pendekatan top-down dapat efektif jika didukung oleh koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta adanya mekanisme monitoring yang kuat.

Pendekatan lain yang sering digunakan adalah pendekatan bottom-up, yang melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan di tingkat lokal, seperti guru, siswa, dan masyarakat, dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal. Menurut penelitian oleh Datnow (2020), pendekatan bottom-up dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan karena melibatkan mereka yang paling dekat dengan proses pendidikan dan memahami konteks spesifiknya.

Model implementasi kebijakan pendidikan juga mencakup model adopsi bertahap (incremental model) dan model perubahan radikal (radical change model). Model adopsi bertahap memungkinkan penyesuaian dan perbaikan terus-menerus berdasarkan umpan balik dari lapangan. Fullan (2015) menyebutkan bahwa perubahan yang dilakukan secara bertahap lebih mungkin diterima oleh pemangku kepentingan dan lebih mudah dikelola karena memungkinkan adanya evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Di sisi lain, model perubahan radikal mengharuskan perubahan besar dalam waktu singkat, yang sering kali diterapkan dalam situasi krisis atau ketika perubahan mendasar dianggap perlu. Model ini membutuhkan komitmen yang kuat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi resistensi dan memastikan keberhasilan implementasi. Menurut Spillane et al. (2002), meskipun lebih menantang, model perubahan radikal dapat menghasilkan transformasi signifikan jika dilaksanakan dengan strategi yang tepat dan dukungan yang memadai. Setiap pendekatan dan model implementasi kebijakan pendidikan memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada konteks spesifik, kesiapan pemangku kepentingan, dan dukungan sumber daya. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan dan model yang tepat harus didasarkan pada analisis mendalam dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengukuran dan Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Pendidikan

Pengukuran implementasi kebijakan pendidikan adalah langkah krusial untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui berbagai indikator, seperti tingkat pencapaian akademik siswa, kualitas proses pembelajaran, dan kepuasan pemangku kepentingan.

Menurut Darling-Hammond (2017), pengukuran yang komprehensif harus mencakup aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak kebijakan .

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan meliputi dukungan sumber daya, kapasitas institusi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kondisi lingkungan. Dukungan sumber daya, baik finansial, material, maupun manusia, sangat menentukan keberhasilan implementasi. Hanushek dan Woessmann (2015) menegaskan bahwa investasi yang memadai dalam sumber daya pendidikan secara signifikan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pendidikan. Kapasitas institusi pendidikan, termasuk kompetensi tenaga pengajar dan kepemimpinan sekolah, juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Institusi yang memiliki kapasitas yang baik lebih mampu mengadaptasi dan mengimplementasikan kebijakan dengan efektif. Penuel (2016) menemukan bahwa kepemimpinan sekolah yang kuat dan dukungan profesional yang berkelanjutan bagi guru memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Keterlibatan pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan komunitas, juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Menurut Datnow (2020), keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses implementasi meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap kebijakan, yang pada gilirannya mendukung keberhasilan implementasi.

Kondisi lingkungan, termasuk budaya sekolah dan iklim sosial-ekonomi, juga berperan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Lingkungan yang mendukung, baik di dalam maupun di luar sekolah, dapat mempercepat proses implementasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Spillane et al. (2002) menyatakan bahwa pemahaman tentang konteks lokal dan penyesuaian kebijakan terhadap kondisi spesifik lingkungan sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan baik. Dengan memperhatikan pengukuran yang komprehensif dan faktor-faktor tersebut, implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi serta penggunaan indikator pengukuran yang tepat akan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan kebijakan pendidikan mencapai tujuannya.

Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan adalah proses yang sistematis untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan kebijakan, serta menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Menurut Darling-Hammond (2017), evaluasi kebijakan pendidikan harus didasarkan pada data empiris dan mencakup berbagai indikator yang relevan, seperti hasil belajar siswa, kualitas pengajaran, dan kepuasan pemangku kepentingan, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang dampak kebijakan .

Pendekatan evaluasi yang komprehensif mencakup evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses implementasi kebijakan dan bertujuan untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan segera. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kebijakan diimplementasikan dan bertujuan untuk menilai keseluruhan efektivitas kebijakan tersebut. Fullan (2015) menekankan bahwa kombinasi antara evaluasi formatif dan sumatif dapat memberikan pandangan yang lebih lengkap dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil evaluasi kebijakan pendidikan meliputi kualitas data yang dikumpulkan, metodologi evaluasi yang digunakan, dan partisipasi pemangku kepentingan. Kualitas data yang baik sangat penting untuk menghasilkan analisis yang akurat dan relevan. Hanushek dan Woessmann (2015) menunjukkan bahwa data yang komprehensif dan reliabel memungkinkan evaluasi yang lebih mendalam dan tepat sasaran, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan .

Metodologi evaluasi yang digunakan juga mempengaruhi hasil evaluasi kebijakan pendidikan. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif harus digunakan secara sinergis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Menurut Penuel (2016), penggunaan metodologi campuran (mixed methods) memungkinkan evaluasi untuk menangkap berbagai aspek dari implementasi kebijakan dan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang efektivitas kebijakan. Partisipasi pemangku kepentingan dalam proses evaluasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi mencerminkan realitas di lapangan dan relevan dengan kebutuhan mereka. Keterlibatan aktif dari guru, siswa, orang tua, dan komunitas dapat meningkatkan akurasi dan relevansi data yang dikumpulkan. Datnow (2020) menemukan bahwa partisipasi pemangku kepentingan dalam evaluasi kebijakan pendidikan meningkatkan kualitas hasil evaluasi dan mendukung penerimaan serta implementasi rekomendasi yang dihasilkan .

Dengan memperhatikan konsep dan faktor-faktor tersebut, evaluasi kebijakan pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Evaluasi yang sistematis dan komprehensif memungkinkan identifikasi area yang perlu diperbaiki dan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui evaluasi yang baik, kebijakan pendidikan dapat terus disesuaikan dan ditingkatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Tujuan utama dari evaluasi kebijakan pendidikan adalah untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan terhadap sistem pendidikan dan para pemangku kepentingannya. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah tujuan awal kebijakan telah tercapai, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan di masa depan. Menurut Patton (2013), evaluasi kebijakan pendidikan yang baik harus berfokus pada hasil yang diinginkan, proses implementasi, dan konteks di mana kebijakan diterapkan, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kebijakan tersebut.

Fungsi evaluasi kebijakan pendidikan meliputi fungsi kontrol, fungsi diagnostik, dan fungsi pengembangan. Fungsi kontrol bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi diagnostik membantu mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul selama implementasi kebijakan. Fungsi pengembangan menyediakan informasi dan data yang diperlukan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan agar lebih efektif. Menurut Weiss (2018), fungsi-fungsi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Manfaat evaluasi kebijakan pendidikan sangat luas dan beragam. Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui identifikasi dan perbaikan area yang memerlukan perhatian khusus. Evaluasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Hanushek dan Woessmann (2015) menegaskan bahwa evaluasi yang sistematis dan berbasis bukti dapat membantu pembuat kebijakan membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, evaluasi kebijakan pendidikan juga memiliki manfaat dalam hal pengembangan kapasitas institusi pendidikan. Dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, evaluasi dapat membantu sekolah dan lembaga pendidikan lainnya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan yang ada. Fullan (2015) menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menjadi alat yang efektif untuk pembelajaran organisasi dan peningkatan kapasitas institusional. Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang penting dan bermanfaat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan memberikan dampak positif bagi sistem pendidikan. Dengan tujuan yang jelas, fungsi yang beragam, dan manfaat yang luas, evaluasi kebijakan

pendidikan dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan.

Permasalahan dan Monitoring dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Permasalahan dalam evaluasi kebijakan pendidikan sering kali muncul dari berbagai faktor, mulai dari kurangnya data yang akurat hingga resistensi dari pemangku kepentingan. Kurangnya data yang valid dan reliabel menjadi salah satu hambatan utama dalam evaluasi yang efektif. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan analisis yang keliru dan hasil evaluasi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Menurut Jimerson (2007), pengumpulan data yang akurat dan menyeluruh sangat penting untuk memastikan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Resistensi dari pemangku kepentingan juga menjadi permasalahan signifikan dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Guru, administrator, dan pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan mungkin merasa terancam oleh proses evaluasi atau khawatir akan konsekuensi negatif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, di mana semua pihak yang terlibat merasa memiliki peran dalam proses evaluasi. Darling-Hammond (2017) menyarankan bahwa keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam desain dan pelaksanaan evaluasi dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan akurasi serta relevansi data yang dikumpulkan.

Monitoring merupakan komponen penting dalam evaluasi kebijakan pendidikan, berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan sesuai dengan rencana dan untuk mendeteksi masalah sejak dini. Monitoring yang efektif melibatkan pengumpulan data secara berkala dan sistematis, yang memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan. Hanushek dan Woessmann (2015) menekankan pentingnya sistem monitoring yang robust untuk mendukung proses evaluasi dengan menyediakan data real-time yang dapat digunakan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi, data dapat dikumpulkan, dianalisis, dan dibagikan secara lebih efisien dan akurat. Misalnya, sistem informasi manajemen pendidikan (EMIS) dapat digunakan untuk melacak berbagai indikator pendidikan secara real-time. Menurut Penuel (2016), penggunaan TIK dalam monitoring dan evaluasi memungkinkan pengumpulan data yang lebih cepat dan analisis yang lebih mendalam, sehingga membantu pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan berdasarkan bukti. Secara keseluruhan, mengatasi permasalahan dalam evaluasi kebijakan pendidikan dan memastikan monitoring yang efektif adalah kunci untuk mencapai evaluasi yang bermakna dan berguna. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan teknologi, proses evaluasi dapat diperbaiki, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan dan hasil belajar siswa.

Metode Evaluasi

Evaluasi kebijakan pendidikan memerlukan penggunaan metode evaluasi yang cermat dan komprehensif. Berbagai metode evaluasi digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap proses pembelajaran.

Salah satu metode evaluasi yang umum digunakan adalah teknik pengumpulan data, yang meliputi survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Survei digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah, mengenai persepsi dan pengalaman mereka terkait dengan implementasi kebijakan. Wawancara mendalam dilakukan dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks, proses, dan dampak kebijakan. Observasi langsung dilakukan di lapangan untuk mengamati langsung pelaksanaan kebijakan dan dinamika yang terjadi di lingkungan sekolah. Analisis dokumen digunakan untuk mengevaluasi dokumen resmi, seperti rencana kerja sekolah, laporan

kinerja, dan dokumen kebijakan, guna memahami konteks dan kerangka kerja kebijakan (Patton, 2022).

Selain itu, analisis data juga merupakan bagian penting dari proses evaluasi. Data yang terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami konteks, pola, dan dinamika yang muncul selama implementasi kebijakan. Pendekatan ini mencakup analisis naratif, tematik, dan interpretatif terhadap data kualitatif. Sementara itu, analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak dan efektivitas kebijakan secara statistik (Patton, 2022).

Hasil dari analisis data tersebut kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi yang relevan. Kesimpulan dari evaluasi mengenai efektivitas implementasi kebijakan, keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, serta identifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi. Rekomendasi disusun berdasarkan temuan evaluasi untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan strategis di masa yang akan datang (Patton, 2022).

Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi implementasi kebijakan pendidikan menunjukkan beragam temuan yang memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap proses pembelajaran dan kinerja sekolah. Dari segi efektivitas, evaluasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memberikan beberapa hasil positif yang signifikan. Kurikulum Merdeka, sebagai salah satu kebijakan utama yang diterapkan, memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan minat siswa. Hal ini berdampak pada peningkatan partisipasi siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum yang lebih relevan dan kontekstual mendorong siswa untuk lebih bersemangat dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi belajar dan hasil akademik siswa (Septiani, 2023).

Meskipun demikian, evaluasi juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya, baik dari segi finansial maupun tenaga. Banyak Sekolah menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya pendukung yang diperlukan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan baik. Beberapa guru juga mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran sehari-hari, mengingat kurikulum ini menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih kolaboratif dan kontekstual (Zamzami et al., 2023).

Dampak dari implementasi kebijakan juga dapat diamati dari peningkatan kualitas pembelajaran dan prestasi akademik siswa. Beberapa sekolah melaporkan peningkatan dalam hasil ujian nasional dan peningkatan prestasi siswa dalam berbagai bidang, seperti sains, matematika, dan bahasa. Namun, evaluasi juga menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam prestasi akademik antara sekolah yang memiliki sumber daya yang memadai dan yang tidak. Ini menyoroti perlunya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua siswa, tanpa terkecuali (Reny Azraeny. M et al., 2023) Melalui analisis mendalam ini, evaluasi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas, tantangan, dan dampak dari implementasi kebijakan pendidikan. Temuan ini menjadi dasar penting untuk menyusun strategi perbaikan dan penyesuaian kebijakan di masa yang akan datang, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses pendidikan yang berkualitas sesuai dengan hak mereka.

Contoh Penerapan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas. Salah satu contoh penerapan implementasi kebijakan pendidikan adalah penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek. Dalam metode ini, siswa diberikan proyek-proyek nyata yang relevan dengan kurikulum mereka, yang memungkinkan mereka

untuk belajar melalui pengalaman langsung dan aplikasi praktis (Jaleha & Pantiwati, 2018). Sebagai contoh, sebuah sekolah di daerah perkotaan menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek dengan memberikan proyek kepada siswa untuk merancang dan mengembangkan solusi inovatif untuk masalah lingkungan lokal. Melalui proyek ini, siswa tidak hanya mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu lingkungan, tetapi juga meningkatkan keterampilan kolaborasi, pemecahan masalah, dan kreativitas mereka.

Evaluasi kebijakan pendidikan juga dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Salah satu metode evaluasi yang dapat digunakan adalah evaluasi formatif, yang dilakukan selama proses implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi pemangku kepentingan (Rasmanah et al., 2024). Sebagai contoh, setiap akhir semester, sebuah sekolah melakukan evaluasi formatif dengan mengadakan pertemuan evaluasi bersama guru dan staf sekolah untuk membahas tantangan dan kemajuan dalam implementasi metode pembelajaran berbasis proyek. Diskusi ini membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di masa mendatang.

Selain itu, penerapan teknologi juga menjadi bagian integral dari implementasi kebijakan pendidikan di sekolah. Sebuah sekolah di daerah pedesaan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil. Mereka menyediakan akses ke materi pembelajaran daring melalui platform pembelajaran elektronik, sehingga siswa dapat mengakses materi pelajaran dan tugas dari rumah mereka (Mustika et al., 2024). Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membantu meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pembelajaran, terutama bagi siswa di daerah terpencil (Adisel & Pranayasa, 2020).

Evaluasi kebijakan pendidikan juga melibatkan pengumpulan data yang komprehensif untuk memahami dampak kebijakan tersebut terhadap proses pembelajaran dan prestasi siswa. Sebagai contoh, sebuah sekolah mengumpulkan data ujian akhir semester, hasil tes kognitif dan non-kognitif, serta umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran (Rasmanah et al., 2024). Data-data ini kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan dan mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan.

Dengan menggunakan contoh-contoh penerapan implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan, para pemangku kepentingan dapat memahami pentingnya implementasi kebijakan yang tepat dan evaluasi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan menekankan pentingnya perencanaan yang matang, sosialisasi yang efektif, pelaksanaan yang tepat, dan evaluasi yang cermat. Kurikulum Merdeka, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan pembaruan sarana prasarana adalah beberapa aspek utama yang ditekankan dalam implementasi kebijakan. Proses implementasi di lapangan memerlukan kerjasama yang erat antara semua pihak terkait, sementara evaluasi yang komprehensif membantu mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan dampak kebijakan. Contoh penerapan implementasi dan evaluasi kebijakan menyoroti beragam inisiatif, seperti penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek dan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Evaluasi tersebut memperlihatkan peningkatan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa, namun juga mengungkapkan tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya sumber daya dan kesenjangan antara sekolah. Kesimpulannya, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan adalah proses yang dinamis dan kompleks, tetapi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memperhatikan temuan evaluasi dan melanjutkan inisiatif yang berhasil, diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisel, A., & Pranansa, A. G. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Sistem Manajemen Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid 19. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.31539/alignment.v3i1.1291>
- Aulia, G. (2016). Stakeholder participation in the implementation of the Adiwiyata program at SMP Negeri 4 Bojonegoro. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(3), 1–10.
- Darling-Hammond, L., Burns, D., Campbell, C., Goodwin, A., Hammerness, K., Low, E.-L., McIntyre, A., Sato, M., & Zeichner, K. (2017). *Empowered Educators: How high performing systems shape teaching around the world*.
- Datnow, A. (2020). The role of teachers in educational reform: A 20-year perspective. *Journal of Educational Change*, 21(3), 431–441. <https://doi.org/10.1007/s10833-020-09372-5>
- Fullan, M. (2015). *The New Meaning of Educational Change*. Teachers College Press. <https://books.google.co.id/books?id=OlhdCwAAQBAJ>
- Gurzynski-Weiss, L. (2018). AILA Matters. *International Journal of Applied Linguistics*, 28(2), 357–365. <https://doi.org/10.1111/ijal.12231>
- Hallinger, P., & Heck, R. (2011). Exploring the journey of school improvement: Classifying and analyzing patterns of change in school improvement processes and learning outcomes. *School Effectiveness and School Improvement - SCH EFFECTIVENESS SCH IMPROV*, 22, 1–27. <https://doi.org/10.1080/09243453.2010.536322>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). *The Knowledge Capital of Nations*. The MIT Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt17kk9kq>
- Hastasasi, W. (2022). Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, April*, 118.
- Husnun, M. N. H. (2023). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA At-Ta'awun Cikedal Pandeglang. *Ta'dibiya*, 3(2), 72–87. <https://doi.org/10.61624/japi.v3i2.59>
- Jaleha, & Pantiwati, Y. (2018). Implementasi Kebijakan Sekolah dalam Menerapkan Pendidikan Karakter Siswa di MTS Muhammadiyah 1 Tlogomas Kota Malang. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1), 101–111. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jkpp>
- Jimerson, S. R., Oakland, T. D., & Farrell, P. T. (2007). The Handbook of International School Psychology. In S. R. Jimerson, T. D. Oakland, & P. T. Farrell (Eds.), *The Handbook of International School Psychology*. Sage Publications, Inc.
- Marliani, R. (2023). Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di MTs YPP Babakan Jamanis melalui Bantuan Renovasi. *Sosiosaintika*, 1(1), 34–39. <https://doi.org/10.59996/sosiosaintika.v1i1.30>
- Mukhlisin, A., Putri, C. T., Syuhadi, F., Ningsih, P. R., & Bulan, S. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan di MTs PAB 2 Sampali turut mempengaruhi MTs PAB 2 Sampali . Pergeseran dari pendidikan konvensional ke. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*, 2(1), 84–97.
- Mustika, H., Syaftientias, W., Wahyuningsih, D., Ningsih, S. Y., Fitri, R., Hartati, Y. F., & Novita, L. (2024). Implementasi Teknologi Dalam Pembelajaran Untuk Meningkatkan Karakter Unggul Siswa Mts Al Hidayah di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(11), 2799–2804. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.589>
- Patton, M. Q. (2013). Utilization-Focused Evaluation Checklist. *The Evaluation Center Western Michigan University, January*, 1–19. <http://www.wmich.edu/evalctr/wp-content/uploads/2010/05/UFE.pdf>
- Patton, M. Q. (2022). *Utilization-Focused Evaluation: The New Century Text*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=1Fvo0jeD0mgC>
- PENUEL, W. R. (2016). Learning to Improve: How America's Schools Can Get Better at Getting Better, edited by Bryka. S., GomezL. M.GrunowA., and LeMahieuP. Harvard University Press, Cambridge, MA, 2015. 280 pp. ISBN-10: 1612507913. *Science*

- Education*, 100(4), 777–779. <https://doi.org/10.1002/sce.21223>
- Rasmanah, C., Nurjamiludin, I., Andriani, N., Nurmalasari, N., R, J., & Azzahra, P. R. (2024). Evaluasi Implementasi Kurikulum. *Sosiosaintika*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.59996/sosiosaintika.v2i1.319>
- Reny Azraeny, M., Hasanah Nur, & Anas Arfandi. (2023). Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan di Kota Sorong. *Seminar Nasional Dies Natalis 62*, 1, 412–416. <https://doi.org/10.59562/semnasdies.v1i1.1014>
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2018). *Evaluation: A Systematic Approach*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=eDZ2DwAAQBAJ>
- Septiani, P. (2023). Implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar dan efektivitas peran guru. *Conference*, 20, 587–591.
- Spillane, J. P., Reiser, B. J., & Reimer, T. (2002). Policy Implementation and Cognition: Reframing and Refocusing Implementation Research. *Review of Educational Research*, 72(3), 387–431. <https://doi.org/10.3102/00346543072003387>
- Subhkan, E., & Wahyudin, D. (2024). *Kajian Akademik Kurikulum Merdeka*. 1–143.
- Taufan, J., & Mazhud, F. (2016). Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah X Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(1). <https://doi.org/10.17509/jpp.v14i1.3213>
- Yunalis, Y., & Herman, M. (2018). Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Guru. *IJEMAR: Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1), 205–212. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ijemar/article/view/1826%0Ahttps://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ijemar/article/viewFile/1826/1505>
- Zamzami, M. R., Subaidah, S., & Lailiyah, S. (2023). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di MI Nurul Huda Sidoarjo. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(1), 103–116. <https://doi.org/10.31949/jee.v6v1.4655>